

Filantropi Global Membentuk Negara Kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi

Global Philanthropy Shaping Welfare States: Islamic and Jewish Perspectives

Muhamad Fauzi¹, Agus Gunawan²

¹Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

²Pascasarjana UIN SMH Banten, Indonesia

Email: ojixzy1979@gmail.com

Keywords :

Global, State, Philanthropi,
Welfare, Religion

DOI :

10.30595/jssh.v6i2.13608

***Abstract.** The world view of the nation's life and state building on power of a stable and peaceful global government despite problems. Global philanthropy is alternative a potential professional resources building awareness of giving and sharing based on humanity. The power of philanthropy can support creating a welfare state it expected by every citizen regardless of the state ideology adopted. The purposes of study to drawing global governance and global philanthropic practices making welfare state. The research method uses literature studies with a documentation approach sourced from books, journals, and institutional reports. The results show that the global government is still facing significant problems, including poverty and the humanitarian crisis until now the Covid-19 pandemic, where the poverty line in the world has increased to reach 729 million rupiah. The accumulation of global philanthropy plays an essential role as an alternative to achieving a welfare state based on solidarity and generosity, which impacts 23 million people in Indonesia as beneficiaries of zakat philanthropy. In contrast, tzedakah philanthropy from Jews provides benefits worth US\$ 1.4 billion. The implication of global philanthropy in line by goal welfare state concept, which is not dominated by the state's role but involves civil society.*

Abstrak. Pandangan dunia terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi penting terbangun atas kekuatan pemerintahan global yang stabil dan damai walaupun banyak permasalahan yang dihadapi. Peran filantropi global menjadi alternatif sumber daya potensial dalam membangun kesadaran memberi dan berbagi atas dasar kemanusiaan sehingga kekuatan filantropi dalam mendukung terciptanya negara kesejahteraan yang diharapkan setiap warga negara tanpa melihat ideologi negara yang dianut. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan peran pemerintahan global dengan praktek filantropi global menuju negara kesejahteraan. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan studi dokumentasi yang bersumber dari buku, jurnal dan laporan lembaga Hasil kajian menunjukkan pemerintahan global masih menghadapi masalah besar di antaranya kemiskinan dan krisis kemanusiaan hingga saat ini terjadinya pandemi Covid-19, di mana di bawah garis kemiskinan di dunia bertambah mencapai 729 juta jiwa. Akumulasi filantropi global memberikan peran penting sebagai alternatif mencapai negara kesejahteraan yang didasari solidaritas dan kedermawanan yang memberi dampak kepada 23 juta jiwa di Indonesia sebagai penerima manfaat dari filantropi zakat sedangkan dari filantropi tzedakah dari kaum Yahudi memberikan manfaat senilai US\$ 1,4 milyar. Implikasinya filantropi global senada dengan tujuan konsep negara kesejahteraan

yang tidak didominasi peran negara tetapi masyarakat sipil terlibat.

Kata kunci: Global, Negara, Filantropi, Kesejahteraan, Agama

PENDAHULUAN

Membangun peradaban dunia membutuhkan peran yang memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, di mana salah satunya berbangsa dan bernegara yang di dalamnya terdapat instrumen antara lain: lembaga, legal formal, komunitas, warga negara dan pemerintah itu sendiri. Dalam mencapai tujuannya sebagai bangsa setiap instrumen di dalamnya bertujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara berlandaskan legal formal yang telah dibentuk melalui mekanisme yang telah ditetapkan sehingga negara menjadi konsep kompleksitas yang bersumber pada bentuk, fungsi dan struktur kedaulatan melibatkan komponen wilayah, aparat dan penduduk (Fuadi, 2015).

Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan (*regulator*) dan melaksanakan kebijakan (*eksekutor*) berperan penting dalam mengelola negara dan antar negara, hal ini penting sebagai bentuk tanggungjawab membuka komunikasi dan kerja sama yang lebih luas. Mengapa hal tersebut menjadi fokus dunia saat ini dalam mewujudkan kawasan negara (*community states*) yang bertujuan mengikat kuat hubungan kawasan antar negara dengan membentuk komunitas kepentingan antara lain: ketidakseimbangan ekonomi global, kemiskinan, pengangguran, politik, kemanusiaan dan teritorial yang disertai dengan kejahatan telah melanda di

hampir seluruh penjuru dunia sehingga adanya pemerintahan global (*global governance*) menciptakan harapan baru dalam mewujudkan tatanan kesejahteraan dan keadilan yang lebih luas sehingga Sukmana (2016) menjelaskan konsep pemerintahan global dapat membantu memahami interaksi dan transformasi politik dunia dengan cara yang lebih hati-hati.

Untuk itulah pemerintahan global menjadi kekuatan baru di atas bangsa-bangsa yang ditandai dengan globalisasi, namun sayangnya harapan tersebut masih jauh antara yang di diharapkan (*das sollen*) dan diterima sebagai kenyataan (*das sein*) sehingga hadirnya pemerintahan global sebagai adanya pelemahan negara dalam kapabilitasnya menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya baik dalam lingkup nasional maupun transnasional sebagai dampak globalisasi yang menjadi faktor utama khususnya bidang ekonomi akibat semakin kuatnya peran pasar sehingga dibutuhkan peran negara sebagai bentuk campur tangan (*intervensi*) yang dikhawatirkan kedaulatan negara menjadi subordinasi dari kuatnya peran pasar (*market power*) karena pasar memegang peranan besar dalam siklus ekonomi dan politik yang berkembang. Walaupun di dalam konsep *global governance* meskipun negara merupakan aktor penting namun negara bukan satu-satunya aktor di dalam *governance* tersebut, untuk itu David (2017) mengistilahkan *governance* sebagai

kegiatan pemerintah dengan melibatkan cakupan lainnya melalui bentuk dan tujuan yang dibingkai, dikeluarkan dan ditargetkan.

Guna menghindari terjadinya konflik dan permasalahan dalam tata kelola negara, sangat berbahaya jika terjadinya diawali dengan ketidakadilan sebab tidak sedikit negara berakhir atau bubar karena lemahnya peran negara akan menciptakan kegagalan negara (*state failure*) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan rasa aman serta kekuatan atas gangguan dari negara lain, di mana Schwarz and Corral (2011) mengatakan kedaulatan negara bukan lagi sesuatu yang eksklusif milik negara yang bersangkutan karena selama berabad-abad kita telah menyaksikan bahwa kedaulatan telah terbagi-bagi di antara berbagai aktor, yang bahkan telah melanggar batas-batas wilayah.

Kehadiran dan terbentuknya pemerintahan global yang diwakili dengan berbagai kepentingan, antara lain: perserikatan bangsa-bangsa (PBB), kerja sama negara Islam (OKI), Government-20 (G-20), ASEAN, Asia Pasifik dan sebagainya memberikan pandangan semakin menguatnya hegemoni negara atau bahkan negara terhadap negara lain. Komunitas antar negara-negara memiliki pandangan tentang pentingnya penguatan pemerintahan global yang diakibatkan dengan bentuk permasalahan global di antaranya peperangan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, terorisme dan sebagainya.

Menurut UNDP (2020) jumlah kemiskinan di dunia saat ini meningkat setelah adanya Covid-19 di mana orang yang baru keluar dari garis kemiskinan

kembali lagi masuk ke dalam kelompok miskin belum ditambah dengan adanya konflik, dan perubahan iklim. Dugaan sementara dari efek pandemi COVID-19, memproyeksikan bahwa tambahan 88 juta hingga 115 juta orang akan didorong ke dalam kemiskinan ekstrem, sehingga totalnya menjadi antara 703-729 juta orang miskin di dunia saat ini. Fakta tersebut harus diselesaikan dengan melalui penguatan pemerintahan global yang melibatkan semua negara untuk saling membantu sehingga perlu adanya kepedulian negara sebagai aktor dalam berkontribusi mengurangi tingkat kemiskinan di dunia.

Penguatan pemerintahan global dalam segala bidang yang berkaitan langsung dengan penghidupan warganya, hadirnya perilaku kedermawanan (*philanthropy*) dengan menghindari sikap kapitalisme akan mampu memperkuat struktur modal penduduk (*society structure*) sehingga dapat menjaga stabilitas negara masing-masing dan memperkuat kerja sama dengan negara lain. Bersama memahami bahwa setiap pergantian pemerintahan dan globalisasi pada kebijakan sosial menjadi perubahan signifikan tentang tanggung jawab untuk tindakan sosial dalam kerangka pemerintahan global. Penekanan pada tanggung jawab global bagi pemerintah dan non-pemerintah untuk kesejahteraan manusia telah menghasilkan peningkatan pada filantropi, yang melampaui batas-batas nasional dan kewarganegaraan, untuk menjalankan peran yang sebelumnya didominasi oleh negara kesejahteraan dan kebijakan nasional terkait Nickel (2018) Guna mendukung kehidupan manusia yang lebih baik

Masmuddin (2017) menegaskan dengan realitas makhluk sosial manusia niscaya berinteraksi sosial antar sesama karena tanpa interaksi tersebut manusia akan hidup sebagaimana mestinya.

Walaupun kegiatan filantropis menjadi kritik disebagian negara dianggap 'cuci tangan atau penghapus dosa' bagi pemodal besar. Kemudian Sangadji (2019) menunjukkan bahwa industri filantropis humanitarian bergantung secara finansial dari Amerika Serikat. Dana humanitarian global tahun 2018 sebesar US\$15,16 miliar di mana Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa menyumbang 63,05% yang disalurkan melalui lembaga-lembaga donor termasuk perserikatan bangsa-bangsa. Untuk itu pada tahun 2019 diumumkan sebagai tokoh filantropis dunia dipegang oleh Warren Buffet dengan menyumbangkan sebesar US\$ 37 Milyar (Jatikusumo, 2020).

Pandangan filantropis walaupun bukan hanya dipandang dari satu agama akan tetapi menjelma pada semua kehidupan manusia beragama, untuk itu agama hadir memberikan landasan yang memberikan manfaat yang lebih luas, sehingga Astuti (2015) mengatakan bahwa dalam agama-agama terdapat ajaran yang memiliki kesamaan arti dengan filantropi. Hal tersebut mengartikan agama sebagai ajaran tentang kepatuhan dan kewajiban akan aturan, petunjuk dan perintah yang diberikan Tuhan (Allah) kepada manusia melalui utusan-utusannya. Dalam pandangan semua agama memiliki idealisme, filosofis dan teologis yang dibanggakan yang menjadikannya masih bertahan dengan mencari dasar rasional atas keimanan (Erawati, 2017). Pada fase

awal masa modern setelah adanya kebangkitan nasional Yahudi, di mana filantropi membawa kesan negatif dikarena pendukungnya menganggap sebagai lambang dari lemahnya Yahudi yang berdiaspora sehingga menimbulkan pada krisis politik dan ekonomi yang tergantung pada orang lain (Kabalo, 2012).

Pentingnya kehadiran pemerintahan global menjaga stabilitas negara dan kepentingan kawasan antar negara terhadap kesejahteraan dan keadilan serta meminimalisir ketimpangan (*gap*), hal ini mewujudkan sikap peduli dan sadar (*aware*) dengan mengatasi berbagai permasalahan sehingga penting bagi tercapainya negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai manifestasi peradaban dunia yang aman dan adil untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera Fuadi (2015) disertai dengan menjamin kesejahteraan yang lebih sedikit bagi setiap warna negaranya (Sukmana, 2016).

Dalam setiap sistem pemerintahan nasional yang terlaksana pada setiap negara memiliki prioritas utama memberikan pelayanan kepada warga negaranya, akan tetapi setiap negara dan sistem pemerintahan memiliki kelemahan, sebagai upaya penguatan negara penting melakukan hubungan dan kerja sama dengan negara lain yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Kolaborasi ini memberikan akses kepada negara sekitarnya atau kawasan sehingga dapat memberikan dampak baik secara nasional, regional kawasan dan transnasional.

Lebih lanjut Weiss and Wilkinson

(2018) menyatakan bahwa pemerintahan global mengacu lebih dari sekedar lembaga dan organisasi formal dalam pengelolaan urusan internasional. Peran Perserikatan Bangsa Bangsa dan pemerintah nasional jelas merupakan pusat dari pelaksanaan pemerintahan global, tetapi mereka hanya sebagian dari gambaran lengkap, sehingga dalam pemahamannya bahwa tata kelola global dipahami untuk memasukkan sistem aturan di semua tingkat aktivitas manusia dari keluarga hingga organisasi internasional tujuan melalui pelaksanaannya yang memiliki dampak transnasional.

Secara teoritis, pemerintahan global dapat menawarkan konsep analitis untuk memasukkan berbagai upaya di tingkat global untuk mengatasi hilangnya kendali dan untuk menyeimbangkan proses globalisasi yang tidak terkendali (Weiss & Wilkinson, 2013). Pentingnya keseimbangan antara peran negara dan individu menjadi fokus bagaimana pemerintahan global baru lebih memperhatikan pada kesetaraan dan keadilan sehingga memberikan kepastian kepada warga dan partner kerja samanya untuk melakukan peranan tersebut.

Sementara itu Broussine dan Callahan (2015) mengadopsi konsep politik pemerintahan global dan berpendapat bahwa tujuan dari pemerintahan global terletak pada mendapatkan kembali kendali masyarakat atas kekuatan pasar yang telah hilang setelah globalisasi. Ini jelas berbeda dari pemahaman analitis dari istilah yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Dengan demikian negara kesejahteraan menjadi suatu model ideal dalam pembangunan

difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan melalui peran penting negara dalam memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh kepada warganya dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan individu dan peran negara itu sendiri.

Praktik filantropi ini mempertahankan kondisi cara produksi kapitalis sambil juga menyembunyikan dampak negatifnya pada kesejahteraan manusia sebagai kebaikan sehingga para filantropis berpendapat bahwa sistem yang menghasilkan kapasitas pengaturan filantropis dengan kekayaan adalah hal alamiah tetapi di lain sisi pahala menjadi mitos karena kita dilahirkan bukanlah masalah pilihan, tetapi kebetulan. Paradigma filantropis pada pemerintahan global berkontribusi mengendalikan perilaku subjek lintas batas dan sistem politik serta tata kelola transnasional (Schowalter, 2014).

Filantropi di era pemerintahan global bertindak untuk menstabilkan perampasan kesejahteraan karena para filantropis, yang dianggap sebagai gubernur yang sah secara tidak kritis, mengumpulkan kekuasaan untuk membuat kebijakan sosial. Asumsi yang mendasari filantropi saat ini adalah bahwa tujuannya adalah untuk mengakhiri marginalitas dengan baik hati yang mengakibatkan pengingkaran kesejahteraan bagi sebagian orang. Namun, dalam praktiknya, filantropi seringkali dibangun dan didukung oleh hal yang diklaimnya sebagai *end-marginality* yang diartikan akhir dari tujuan yang dirasakan manfaatnya.

Politik filantropi terjadi apabila

filantropi dipisahkan dari fakta bahwa filantropi hanya bisa ada melalui keuntungan, eksploitasi, dan akibatnya menciptakan keterasingan dan kemiskinan. Untuk itu praktek filantropi harus mengedepankan sosial kemanusiaan yang tinggi sebagai langkah mewujudkan pemerintahan global yang kuat dan dinamis melalui distribusi kekayaan dalam dunia kemiskinan (Korankye, 2014). Namun konvergensi kekayaan dan keuntungan atas nama kebajikan telah menghasilkan asumsi yang tersebar luas bahwa kesejahteraan paling baik dicapai bukan melalui kebijakan sosial nasional, tetapi melalui pencarian keuntungan (Vavrus, 2014).

Dengan demikian bagaimana filantropi ini memberikan dukungan menciptakan tatanan pemerintahan global yang kuat dan harmonis, maka diperlukan tindakan pemerintah atau tindakan filantropis, akumulasi kekayaan, redistribusi kekayaan, dan hubungan antara kekayaan dan kesejahteraan antar warna negara dunia yang lintas batas negara, etnis, agama dan budaya serta menciptakan peradaban dunia yang damai.

Permulaan negara kesejahteraan pada pertengahan abad XX setelah terjadinya *great depression* di mana pandangan Sukmana, (2016) mengatakan bahwa setiap individu berhak mencapai harapan sesuai dengan kepentingannya walaupun tidak mengindahkan intervensi pemerintah (*laissez faire*) sehingga dapat pencapaian tingkat terbaik bagi masyarakat dan individu tersebut akan dibimbing oleh sesuatu yang tak terlihat (*invisible hand*). Oleh sebab itu pandangan kapitalistik dan individualistik memegang

pentingnya materialisme sehingga tidak memandang orang lain sebagai sifat kemanusiaan. Adapun ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18, di mana Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada penduduknya dengan menggunakan istilah manfaat (*utility*) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan (Fuadi, 2015).

Dalam mewujudkan negara kesejahteraan sekurangnya ada tiga model pendekatan, pendapat Salamah (2012) pertama, model liberal (dukungan sosial terbatas berupa jaring pengaman, menciptakan skema pembiayaan, pengembangan industri dan perdagangan). Kedua model konservatif (mengusahakan skema kesejahteraan oleh negara, perlunya kolaborasi warga negara atau pekerja dengan sektor swasta dengan pajak, membiayai kondisi warga negara bagi sakit, pengangguran, cacat dan tua sebagai proteksi sosial. Ketiga model sosial-demokratis (pajak membiayai keseluruhan kesejahteraan, layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, integrasi industri dan perdagangan).

Dari keruntuhan sistem kapitalisme, maka pentingnya negara menyejahterakan warganya dengan menunjukkan adanya fungsi negara melalui kebijakan makro sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Elviandri et al., (2019) *welfare state* bercita-cita mencapai kesesuaian antara fungsi kekuatan negara dengan kemauan/kebebasan pribadi, dalam

pengertian lain memahami negara sebagai rezim kesejahteraan (*welfare regime*) dengan memberi peluang peran yang lebih dari sekedar kebijakan sosial (Triwibowo & Bahagijo, 2013). Kedua pandangan tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan negara dan kepentingan individu agar tercipta tatanan keadilan dan pemerataan yang lebih substansi.

Peran penting pemerintahan global banyak menampilkan dirinya sebagai *agent of socio-economic development*, di mana pemerintah tidak hanya dalam tugasnya memberi dorongan dengan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan pendistribusian barang dan jasa melalui keuangan negara (*public expenditure*).

bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi memperluas distribusi ekonomi melalui pengeluaran negara (*public expenditure*) melalui kebijakan anggaran negara dan kebijakan publik lainnya dengan menyediakan dana serta daya guna menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses dalam pembangunan (Fuadi, 2015). Untuk itu ideologi negara kesejahteraan bukan terpusat pada peranan negara tetapi memberikan kepastian hukum, keamanan nasional dan internasional dan sosial kemasyarakatan (Elviandri, dkk, 2019).

Dengan apakah negara kesejahteraan menjadi harapan bagi pemerintahan global dengan peran filantropi yang digerakkan atas dasar agama (keimanan) memberikan ruang gerak yang besar dalam membangun masyarakat sipil dalam negara ataupun

antar negara sehingga mampu mewujudkan negara yang stabil, aman, damai dan sejahtera?

Dalam penjelasan di atas, jelas bahwa permasalahan adanya pemerintahan global jika tidak dikelola dengan baik maka akan menciptakan negara gagal, agar tidak terciptanya hal tersebut perlu instrumen filantropis sebagai penguatan pemerintahan global dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktek filantropi global dalam mencapai negara kesejahteraan.

METODE

Dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*literature research*) bertujuan memberi pemahaman akan permasalahan yang dijawab. Sedangkan pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang bersumber pada buku, artikel, laporan resmi lembaga dan sumber lainnya. Dari studi pustaka yang dilakukan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan baik dari aspek kebermaknaan dengan aktualisasi pemerintahan global, praktek filantropi berlandaskan agama (keimanan) dan konsep negara kesejahteraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembangunan ekonomi, di mana globalisasi ditandai sebagai liberalisasi perdagangan dengan tidak mengenal batas teritorial baik yang berlaku regional dan internasional sehingga semua negara dapat ikut terlibat langsung sebagai langkah kerja sama dan hubungan internasional dengan tujuan mencapai kesetaraan. Adapun bentuk kerja sama antar negara dalam

komunikasi atau kelompok memberikan anggapan bahwa aktor non-negara menjadi aktor utama dan primer dalam perekonomian secara luas, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan negara dan non negara menjadi penting, sebagaimana pendapat Rusdiyanta, (2018) dalam globalisasi akan mencapai tujuan jika negara dominan negara sebagai aktor sangat diperlukan.

Pilar utama tatanan global secara eksplisit memberikan hak khusus kepada negara kaya dan berkuasa agar berupaya membuka atau membentuk komunitas negara agar tidak terciptanya *gap* atau ketimpangan antar kawasan. Terbukanya setiap negara membentuk atau mengikuti dalam sistem pemerintahan global dengan tetap mengedepankan sikap hormat menghormati antara negara tanpa menimbulkan konflik. Untuk itu David, (2017) menghendaki bahwa dalam elemen pemerintahan global secara hierarki dapat diperlukan untuk menjamin partisipasi semua negara dalam pemerintahan global.

Penguatan peran negara sering dianggap sebagai manifestasi dari ideologi sosialisme sedangkan ketika pelemahan negara dianggap sebagai serangan kapitalisme, adanya kedua pertentangan tersebut mewakili kepentingan ideologi tersebut. Dalam pandangan pemerintahan global, setiap ideologi yang dipegang setiap negara tidak saling menghilangkan. Penguatan dan pelemahan peran negara sering diperdebatkan, di mana menguatnya peran negara seringkali diklaim sebagai manifestasi dari ideologi sosialisme, sedangkan pelemahan fungsi negara atas ekonomi menjadi manifestasi dari ideologi kapitalisme.

Pertentangan kedua ideologi ini seringkali nampak ke permukaan dalam konteks negara-negara yang mewakili kepentingan ideologi tersebut, untuk itu pendapat Manzini (2018) bahwa pemerintahan global lebih mengacu dari sekedar lembaga dan organisasi formal dalam pengelolaan urusan internasional. Sedangkan dalam pemerintahan global penting dalam mengatasi hilangnya kendali yang bertujuan menyeimbangkan proses globalisasi yang tidak terkendali (Tambunan, 2012).

Walaupun sebagai komunitas atau kerja sama lembaga formal yang berorientasi pada internasional, peran pemerintahan global memiliki peran penting sebagai pengendali atas peran pemerintahan global dan globalisasi yang ditimbulkan sehingga tujuan yang ditetapkan akan terlaksana dengan prinsip yang ada. Untuk itu pendapat Dasgupta dan Kanbur (2011) di mana pemerintahan global bertujuan mendapatkan kembali kendali masyarakat atas kekuatan pasar yang telah hilang setelah globalisasi. Tantangan utamanya di mana munculnya kecenderungan yang kompleks dan multi-kausal dari politik dunia ini, Sehingga pemerintahan global lebih jelas dan tepat dalam langkah menuju tatanan politik dunia yang lebih baik. Kemudian Luke (2017) menilai gagasan globalisasi akan membentuk negara dalam kawasan saling bergantung baik hubungan antar negara maupun dengan lembaga swasta/non pemerintah (NGO). Kemudian globalisasi dengan pemerintahan global menjadi fenomena beragam yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, politik, teknologi dan budaya (Mir et al., 2014).

Dimensi yang dilihat Hamilton dalam Silitonga (2020) globalisasi sebagai integrasi perekonomian, teknologi, politik, budaya, dan aspek sosial antar negara di dunia dan berdimensi global dengan nilai-nilai negara. Dalam globalisasi yang disajikan dengan bentuk transnasional antara lain: individualisme, liberalisme, individualisme, kapitalisme, sosialisme dan hegemoni sektarian akan mempengaruhi corak berpikir serta berperilaku masyarakat melalui proses interaksi dan tarik-menarik dengan nilai-nilai (Rusdiyanta, 2018). Kekuatan globalisasi dan pemerintahan global menciptakan tatanan negara yang lebih baik melalui komunitas yang terbentuk sebagai langkah mencapai pembangunan dan pemerataan, untuk itulah penting hadirnya sifat kedermawanan atau filantropi di setiap negara sebagai tanggung jawab sosial kemanusiaan yang tidak terbatas negara ataupun suku, etnis dan agama.

Praktek filantropi global membawa sumber daya finansial yang signifikan ke dalam hubungan internasional, di mana \$ 43,9 miliar dengan Amerika Serikat sumber tunggal terbesar dari filantropi global pada tahun 2014 dengan memberikan sekitar \$ 33,1 miliar dalam bantuan pembangunan resmi (CGP, 2016). Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa setiap negara harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam negaranya sebab penting membangun kepedulian kepada negara lain.

Semakin maraknya kegiatan filantropi di dunia memberikan sinyal bahwa semakin banyaknya masyarakat sipil (*civil society*) bergerak menciptakan

dukungan yang spontan dan berkelanjutan menanamkan tata kelola pemerintahan global yang melemah, untuk itu Scholte mengatakan terdapat lima dimensi utama yang dapat digunakan untuk melihat dampak dari pemerintahan global yaitu dimensi evolusi kelembagaan, dimensi agenda, dimensi keputusan, dimensi diskursus dan dimensi struktur sosial (Weiss & Wilkinson, 2013) . Indikator tersebut setidaknya dapat mengukur seberapa kuat pemerintahan global menjaga stabilitas yang dibangunnya sehingga kekuatan masyarakat sipil tidak bisa diabaikan sebab dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam pembangunan.

Pentingnya rasa kepedulian dan kedermawanan memunculkan yayasan filantropi internasional pada awal abad dua puluh, yang menjadi fokus utama antar lintas negara pada bidang kesehatan dan bidang produksi pertanian (Moran, 2013). Demikianlah dampak filantropis dapat memprediksi perilaku filantropi yang berbeda karena di dalamnya mengandung tentang pemberian amal agar dapat saling terkait dengan model filantropi lainnya (Youde, 2018).

Organisasi filantropi dan filantropis perlu dianggap serius sebagai aktor yang relevan dan penting oleh hubungan internasional sebagai disiplin ilmu. Di mana organisasi filantropis memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengubah agenda politik global dan dapat melakukannya dengan cara yang berbeda dari jenis aktor non-negara lainnya. Untuk mengapresiasi sepenuhnya dinamika tata kelola global di era saat ini dan memahami dinamika tata

kelola global di masa depan, maka diperlukan adanya

Bagaimana peran pemerintahan global dapat diperkuat dengan filantropi? Jawabannya dengan adanya hubungan internasional menggabungkan filantropi sebagai kekuatan penting dalam politik global dan organisasi filantropi sebagai aktor yang relevan untuk analisis. Hal ini bukan memberi indikasi bahwa dengan penguatan peran filantropi akan melemahkan peran pemerintahan global, namun tetap memberi dukungan penuh pemerintahan global itu sendiri. Dengan demikian, mereka memiliki domain kekuatan mereka sendiri (Youde, 2018).

Sektor filantropi secara umum, berada dalam posisi yang baik dengan investasi yang cukup, komunitas filantropi dapat memimpin upaya nasional untuk membantu pekerja yang berjuang dalam pekerjaan berupah rendah saat ini dan mempersiapkan anak-anak saat ini untuk siap sukses di pasar tenaga kerja masa depan. Dalam hal lain paradigma filantropis pada pemerintahan global berkontribusi mengendalikan perilaku subjek lintas batas dan sistem politik serta tata kelola transnasional (Schowalter, 2014).

Negara-negara Afrika sekitar 50-80% dari biaya kegiatan pertanian mereka ditanggung oleh dermawan dan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam hasil dan peningkatan yang dirasakan dalam mata pencaharian mereka. Praktik filantropi yang masih berstatus quo seperti yang dipraktikkan secara luas di seluruh dunia yang dapat menyelesaikan masalah terkait kemiskinan (Asuru, 2015). Dengan demikian dampak filantropi menciptakan

redistribusi langsung sehingga menjadi pelengkap dalam konteks pengurangan ketimpangan melalui pengurangan pajak yang besar untuk sumbangan amal (Dasgupta & Kanbur, 2011).

Karenanya filantropi harus dilihat sebagai sektor pembangunan alternatif ketiga karena memberikan ruang bagi institusi filantropi untuk membangun institusi yang kuat guna meningkatkan daya terobosan pembangunan. Membangun kerja sama, bersesuaian satu sama lain, saling berkomunikasi dan menciptakan dialog antar pelaku pembangunan yang berbeda (Tamim, 2016). Untuk itu praktek filantropi harus mengedepankan sosial kemanusiaan yang tinggi sebagai langkah mewujudkan pemerintahan global yang kuat dan dinamis melalui distribusi kekayaan dalam dunia kemiskinan. Konvergensi kekayaan dan keuntungan atas nama kebajikan telah menghasilkan asumsi yang tersebar luas bahwa kesejahteraan paling baik dicapai bukan melalui kebijakan sosial nasional, tetapi melalui pencarian keuntungan (Makhrus, 2018).

Peradaban dunia menjadi pandangan bersama atas peristiwa dan manfaat di dalamnya tidak terkecuali aspek kemanusiaan yang universal, di mana peran setiap individu atau kelompok terpanggil sebagai langkah memanusiakan manusia dalam peran sosialnya. Pentingnya konsep agama masuk ke dalam aspek kemanusiaan dan kehidupan mengasah hati dan keimanan bagi setiap hamba yang ber-Tuhan sehingga menjadi arah atau kiblat di mana mewujudkan cita-cita kehidupan saat ini dan masa mendatang dengan membangun kepedulian sosial dalam

segala aspek, untuk itu bagaimana hal tersebut berkembang menjadi investasi sosial menuju filantropi.

Memaknai filantropi saat ini yang terus berkembang seiring dengan berbagai macam prakteknya, di mana dapat diartikan sebagai investasi sosial (*social investment*), adanya seorang, sekelompok atau perusahaan yang ingin bekerja sama dengan orang yang dibantunya Ibrahim et al., (2021) sehingga filantropi bukan hanya dilakukan secara individualisme tetapi berkembang ke lembaga yang berpotensi memberikan bantuan.

Pada dasarnya konsep negara kesejahteraan berangkat dari usaha suatu negara mengelola sumber daya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Isu-isu ideologi ini bisa ditelusuri kembali ke sistem politik yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan publik dan oleh karena itu dapat dilihat sebagai realitas nyata untuk kebaikan warganya atau tidak. Permasalahan masyarakat tentang ekonomi dan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus segera ditanggapi oleh pemerintah terhadap kebijakan kesejahteraan.

Bentuk filantropi menjadikan peran serta masyarakat sipil dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan dan negara kesejahteraan termasuk di dalamnya kewajiban pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada penduduknya, hal ini senada yang diungkapkan Fauzia et al., (2018) dengan menggunakan istilah manfaat (*utility*) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan

atau kesejahteraan. Adapun mewujudkan negara kesejahteraan ada tiga model yang dapat dikembangkan yaitu model liberal, model konservatif dan model sosial-demokratis.

Negara kesejahteraan bukan hanya menjamin ketersediaan bagi warganya bahkan lebih dari itu memberikan keseimbangan antara kebutuhan negara dan negara lain dalam aspek sosial kemanusiaan, hal tersebut perlu dalam mengapai cita-cita perlu pencapaian keseimbangan antara peran negara dan kebebasan pribadi. Sehingga memberi peran lebih dari kebijakan sosial. Kedua pendapat tersebut sangat memberikan ruang yang lebih besar ketika negara kesejahteraan terbentuk maka akan secara otomatis akan terbentuk kekuatan negara dan pemerintahan global. Terjadinya pemerataan dalam negara kesejahteraan akan memberikan dampak pada jaminan pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses dalam pembangunan (Fuadi, 2015).

Dalam menjelaskan bagaimana negara kesejahteraan memiliki pandangan yang berbeda, dimana aspek filosofis dimana pasar bebas tidak bisa dibiarkan dalam memberi kewenangan dalam kehidupan masyarakat. Namun pada realitasnya sistem pasar bebas bukan hanya memiliki prioritas dalam menangani masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Secara substantif jelas bahwa adanya intervensi dari negara akan menciptakan keseimbangan dalam terjadinya kesenjangan.

Fenomena yang terjadi dimana mekanisme pasar yang ditunjang dengan regulasi akan menciptakan jurang ketimpangan sosial dan memperlebar

kemiskinan. Kondisi tersebut hanya memberi peluang besar bagi yang memiliki kemampuan baik kekayaan atau membayar dalam pasar bebas sehingga memberi keuntungan yang besar dan kenikmatan hidup. Sikap egalitarian tersebut akan menjadi standar institusi yang dapat menjalankan kepentingan mereka yang dimarginalkan secara ekonomi.

Konvergensi antara bagaimana globalisasi yang telah terjadi dengan negara kesejahteraan yang didukung dengan kegiatan filantropi akan memberikan penguatan terhadap aktor negara dalam pemerintahan global, khusus di Indonesia maraknya kegiatan filantropi memberikan dukungan positif bagi pengembangan sosial, ekonomi dan, pendidikan dan kesehatan. Adapun salah satu bentuk filantropi yaitu zakat, di mana laporan Badan Amil Zakat Nasional, Baznas (2020) selama tahun 2019 penyaluran dari zakat sebesar Rp.4,43 triliun, yang didistribusikan ke kategori fakir miskin sebesar Rp. 4,5 triliun (52,4%), dan kategori sabilillah Rp.1,3 triliun (15,7%). Sedangkan program yang terdistribusi kepada penerima manfaat pada tahun 2019 sebagai berikut: untuk program ekonomi Rp.841 milyar dengan penerima manfaat sebanyak 1,1 juta jiwa (4,8%), program pendidikan Rp. 1,2 triliun dengan penerima manfaat 1,8 juta jiwa (7,9%), program dakwah Rp.1,5 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 7,7 juta jiwa (32%), bidang kesehatan Rp.325 milyar dengan penerima manfaat 2,1 juta jiwa (9,3%), program sosial Rp.2,2 triliun dengan penerima manfaat 10,6 juta jiwa (45%), sehingga total penerima manfaat

23 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan penerima manfaat tahun 2015-2019 tumbuh 32,6% dengan peningkatan sebanyak 10,7 Juta Jiwa, dengan efektivitas tingkat penyaluran mencapai 85%.

Konsepsi filantropi Islam, di mana umat Islam memahami tentang bagaimana kemashlahatan yang tetap ada sehingga tidak ada atau meminimalisir kesenjangan kaya dan miskin. Adapun nilai filantropi Islam perlu disadar tingkatkan untuk saling tolong-menolong sehingga tidak terkesan terkotak-kotak pada kondisinya sehingga lambat laun kesejahteraan manusia akan meningkat (Huda et al., 2015).

Fakta tersebut memberikan alternatif di mana dalam permasalahan yang dihadapi pemerintahan global dalam bidang ekonomi, sosial kemanusiaan, kemiskinan, kesehatan dan sebagainya menuju negara kesejahteraan, hal ini perlu penguatan di mana peran masyarakat sipil dalam filantropi memiliki potensi besar guna membantu dalam mencari solusi alternatifnya. Walaupun BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, namun seluruh dana pemanfaatannya akan kembali kepada masyarakat sipil. Di mana zakat ini sebagian besar didapatkan dari zakat fitrah yang dibayarkan pada setiap bulan Ramadhan, Idul Adha, zakat maal, zakat profesi perseorangan dan zakat badan usaha. Data diatas hanya mengungkap dari aspek zakat belum dalam bentuk filantropi yang lain yaitu infak, sedekah dan wakaf. Peran filantropi hubungan dengan masyarakat muslim di Amerika menunjukkan sebagai amal dan filantropi dalam tradisi Islam dan dilihat sebagai

perilaku dan tanggungjawab kemanusiaan serta bertindak sosial (Harpci, 2020). Dengan demikian komunitas muslim telah memberikan banyak peran, diantaranya memberikan kebaikan dan kasih sayang untuk tetangga mereka, membangun rumah bersama komunitas agama lain Yahudi dan Kristen melalui program *habitat for humanity* dan berpartisipasi upaya penanggulangan bencana dan pengungsi.

Adapun sebagian besar pemberian bantuan atau *charity* yang dikumpulkan dan didistribusikan dari yayasan atau organisasi dengan tujuan keagamaan meskipun sekaligus penerima manfaat sehingga memancing adanya sentimen keagamaan dengan semakin banyaknya sumber pemberian berasal dari individu, oleh karena itu hibah untuk tujuan keagamaan hanya menyumbang sebagian kecil dari yang diberikan oleh yayasan atau organisasi. Berdasarkan analisis kami tentang pemberian yayasan swasta untuk tujuan keagamaan, kami telah mencapai lima kesimpulan. Pertama, meskipun organisasi keagamaan adalah penerima manfaat dari dan sentimen keagamaan memotivasi sebagian besar pemberian tingkat individu di negara ini, hibah untuk tujuan keagamaan hanya menyumbang sebagian kecil dari semua penghargaan yang diberikan oleh yayasan swasta. (Hooshmand & Campbell, 2014)

Selain Zakat dalam Islam salah satu kegiatan filantropi yang memberikan dampak, namun di agama Yahudi juga memberikan peran besar dalam pembangunan dan peradaban dunia berikut pendonor terbesar dengan programnya antara lain:

1. Jewish Community Federation of Baltimore melestarikan dan meningkatkan kehidupan Yahudi dengan menangani program pendidikan agama, kemanusiaan, kesehatan dan budaya secara lokal, nasional, di Israel dan di seluruh dunia. (<http://www.associated.org>).
2. Federasi UJA New York peduli kepada orang-orang yang membutuhkan di New York, Israel, dan di seluruh dunia dengan harapan memperbarui dan memperkuat orang-orang Yahudi. Federasi memenuhi tujuan misi melalui jaringan lebih dari 100 badan lokal, nasional dan internasional (<http://www.ujafedny.org/site/PageServer>).
3. Komunitas Yahudi Bersatu mewakili dan melayani 156 federasi Yahudi dan 400 komunitas Yahudi independen di seluruh Amerika Utara. Komunitas Yahudi Bersatu mengedepankan model baru komunitas dan filantropi. Organisasi ini bekerja untuk membangun kerangka kerja untuk peluang baru dan kemitraan baru yang akan menantang orang-orang Yahudi untuk melanjutkan tradisi pendidikan, kepemimpinan, advokasi, dan tanggung jawab agama. (<http://www.ujc.org>) (JCF, 2017).

Dari gambaran di atas kami menilai bahwa dalam menciptakan tatanan pemerintahan global menuju negara kesejahteraan, peran penting filantropi di setiap negara menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan

dengan tujuan membangun peradaban dunia terlepas dari agama, ras, suku dan status. Sebagaimana komitmen seorang yang beriman kepada Tuhan percaya dengan perintah Tuhan dengan menjadi pemberi atau dermawan yang akan diganjar dengan kebaikan.

Dalam kajian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, filantropi Yahudi bersumber dan terdistribusi dari donor komersial dan yayasan komunitas yang besar dan menghasilkan sekitar US\$ 1.200,7 juta dalam bentuk hibah untuk tujuan Yahudi yang digabungkan antara tahun 2013 dan 2018. Filantropis Yahudi meyakini bahwa pekerjaan perintis mereka dalam metode pengumpulan dan distribusi dana pusat melalui federasi amal adalah yang paling berharga sejak keberadaan mereka sebagai suatu bangsa terancam dan menghadapi tantangan tersebut dengan curahan kemurahan hati dan filantropi yang belum pernah terjadi sebelumnya (Adeniji, 2020).

Fakta di atas menjelaskan bahwa peran negara dan dukungan agama menjadikan konsep negara kesejahteraan memberikan keterbukaan bagi setiap warga negaranya untuk melakukan yang terbaik bagi negaranya dan negara lainnya, hal yang mendasari negara kesejahteraan antara lain: 1) *humanitarian* agar rakyat tidak menderita, 2) *demokratis* yang memberikan pilihan alternatif terbaik bagi warganya, 3) *etika* dengan prinsip moral dan kesejahteraan dengan cara saling memberi, 4) *religius* sebagai agama dan organisasi sosial memiliki solidaritas, 5) *saling peduli* dengan melakukan jaminan nasional, dan 6) *ekonomi* yang membantu warganya bebas dari kemiskinan (Elviandri et al., 2019) .

Hal tersebut memberikan indikasi bahwa praktek filantropi global senada dengan konsep negara kesejahteraan yang memberikan keleluasaan kepada warganya atau masyarakat sipil untuk berkontribusi pada kepentingan negaranya dan negara orang lain.

Mengingat pentingnya peran filantropi global yang dibangun atas dasar keimanan beragama memberikan daya dukung terhadap tolong menolong dan solidaritas bersama dikarenakan semua agama memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan perintah Allah (Tuhan) sehingga jelas komitmen bersama sesama umat manusia untuk membangun kesejahteraan bersama melalui instrumen negara. Tanggungjawab negara atas rakyatnya menjadikan komitmen bersama dengan umat beragama menuju negara kesejahteraan.

KESIMPULAN

Peran filantropi menjadi alternatif bagi penyelesaian masalah yang dihadapi pemerintahan global antara lain kemiskinan, krisis kemanusiaan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan sehingga terbangun kepedulian antara negara yang dibangun atas kekuatan masyarakat sipil yang memberi kontribusi terjaganya pemerintahan global yang stabil. Pandangan agama terhadap filantropi memberikan akses terbuka bagi keyakinan akan pentingnya memberi dan menjadi dermawan, sehingga berbagi dan empati menjadi dasar bagi kesatuan dalam pemerintahan global.

Kepentingan pemerintahan setiap negara membentuk kawasan atau komunitas global yang bertujuan menguatkan peran antar negara, baik

regional, trans-nasional dan internasional dengan pelibatan negara sebagai aktor, yang bertanggungjawab menyediakan semua kebutuhan warga negaranya. Komitmen umat beragama dalam perspektif Islam dengan zakat, infak, shodaqah dan wakaf sedangkan perspektif Yahudi melihatnya sebagai *tzedakah* dengan membangun pusat kekuatan bisnis yang kuat, keduanya memiliki dasar keimanan yang sama sebagaimana yang diperintahkan Allah (Tuhan).

Adanya pemerintahan global yang baik ditopang dengan kegiatan filantropis global akan memberikan dampak dalam mewujudkan negara kesejahteraan, di mana bukan hanya sejahtera saja tetapi melainkan aman dan damai sebagaimana upaya menjaga perdamaian dunia. Negara kesejahteraan yang dibangun atas asas keadilan dan pemerataan sehingga tidak menciptakan ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeniji, A. (2020). Here Are the Top 13 Philanthropists Who Support the Jewish Community. <https://www.insidephilanthropy.com/home/2020/2/5/here-are-the-top-13-philanthropists-who-support-the-jewish-community>
- Astuti, I. F. (2015). Agama Dan Filantropi: Studi Atas Pelayanan Sosial Karinakas Perspektif Karinakas. *Religi*, XI(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/rejusta.2015.1102-01>
- Asuru, I. S. (2015). The New Philanthropy, Poverty Reduction and Rural Development: A Case Study of Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) in Ghana. *Journal of Government and Politics*, 6(1), 18–30. <https://doi.org/10.18196/jgp.2015.0003>
- Baznas. (2020). Outlook Zakat Nasional 2020. Puskas Baznas. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Broussine, M., & Callahan, R. F. (2015). Public leadership. In *Public Management and Governance*. <https://doi.org/10.4324/9781315693279-33>
- Dasgupta, I., & Kanbur, R. (2011). Does Philanthropy Reduce Inequality? *The Journal of Economic Inequality*, 9(August 2008), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s10888-009-9123-6>
- David, H. (2017). Elements Of A Theory Of Global Governance. *Glocalism: Journal Of Culture, Politics And Innovation*, 2, 1–14. https://doi.org/10.1007/978-3-642-77037-1_2
- Elviandri, Dimiyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Erawati, D. (2017). Interpretasi Multikulturalisme Agama Dan Pendidikan. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 13(1), 100.

- <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i1.594>
- Fauzia, A., Hidayati, S., Ilmiah, E., & Garadian, E. A. (2018). Laporan Hasil Penelitian Fenomena Praktik Filantropi Masyarakat Muslim dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia.
- Fuadi, A. (2015). Negara Kesejahteraan (Welfare State). *JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1). <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/190/185>
- Harpci, F. (2020). Who Is My Neighbor? Contemporary Muslim Philanthropic Norms In Light Of The Prophetic Model. *Journal Of Muslim Philanthropy & Civil Society*, 4(2), 2–27. <https://doi.org/10.2979/muslphilcivisoc.4.2.01>
- Hooshmand, A., & Campbell, M. I. (2014). Layout synthesis of fluid channels using generative graph grammars. *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing: AIEDAM*, 28(3), 239–257. <https://doi.org/10.1017/S0890060414000201>
- Huda, N., Rifaldi, I., Alhifni, A., El Hasan, S. S., Afrianti, S., & Noer, T. F. (2015). Ekonomi Pembangunan Islam. Bank Indonesia.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). Pengantar Ekonomi Islam (Rifki Isma). Bank Indonesia.
- Jatikusumo, D. (2020). 10 Miliarder Dunia yang Paling Murah Hati. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150449/10-miliarder-dunia-yang-paling-murah-hati>
- Kabalo, P. (2012). Philanthropy and Religion, Judaism. In *International Encyclopedia of Civil Society* (Springer).
- Korankye, A. A. (2014). Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature. *American International Journal of Social Science*, 3(7), 147–153.
- Luke, M. (2017). The Sociology of Globalization. In Polity Press. Polity Press. <http://lcwu.edu.pk/ocd/cfiles/Sociology/Maj/SOC-408/TheSociologyofGlobalization.pdf>
- Makhrus. (2018). Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat. In *Litera* (Issue December). http://digital.library.ump.ac.id/827/1/Dinamika_Filantropi_Islam-Online.pdf
- Manzini, E. (2018). Autonomy, Collaboration and Light Communities. Lessons Learnt from Social Innovation. *Strategic Design Research Journal*, 11(2), 162–166. <https://doi.org/10.4013/sdrj.2018.112.13>
- Masmuddin, M. (2017). Komunikasi Antar Umat Beragama Di Kota Palopo (Perspektif Kajian Dakwah). *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 13(1), 27. <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i1.5>

- Mir, U., Hassan, S., & Qadri, M. (2014). Understanding Globalization and its Future: An Analysis. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 34(2), 607–624. <http://pjss.bzu.edu.pk/website/journal/article/5ea0309b5c9a2/page>
- Nickel, P. M. (2018). Philanthropy and the Politics of Well-Being. *PS - Political Science and Politics*, 51(1), 61–65. <https://doi.org/10.1017/S104909651701408>
- Norman C. Gysbers, P. H. (2012). *Developing & Managing Your School Guidance & Counseling Programs* (5th ed.). Wiley.
- Rolf Schwarz and Miguel de Corral. (2011). States Do Not Just Fail and Collapse. *Democracy and Security*, 07(03), 209–226. <https://www.jstor.org/stable/4860268?seq=1>
- Rusdiyanta. (2018). Peran Negara Menghadapi Globalisasi. *Transnasional*, 5(2), 1–16. https://www.researchgate.net/publication/328900753_Peran_Negara_Menghadapi_Globalisasi/link/5bea55b2a6fdcc3a8dd1d39a/download
- Salamah, U. (2012). Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial. *Insan Akademika*.
- Sangadji, A. (2019). Bencana Humanitarisme dan Rekonstruksi di Era Kapitalisme Neo-Liberal. In *Indoprogess.com*. <https://indoprogess.com/2019/04/bencana-humanitarianisme-dan-rekonstruksi-di-era-kapitalisme-neoliberal/>
- Schowalter, D. . (2014). *Philanthropy as Gendered Global Governance: Philanthrocapitalism, Branded Citizenship, and the Selling of Corporate Social Responsibility*. Minnesota University.
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29271>
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103–122. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Tambunan, T. (2012). *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* Article information: *Journal of Enterprising Communities*, 5(1), 68–82.
- Tamim, I. H. (2016). Filantropi dan Pembangunan. *Jurnal Community Development*, 1(1), 121–136. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/download/2578/1998>
- Triwibowo, D., & Bahagijo, S. (2013). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. In *Perkumpulan PRAKARSA*.
- UNDP. (2020). *Poverty*. www.worldbank.org/en/topic/pover

ty/overview.

Vavrus, M. D. (2014). *Philanthropy as Gendered Global Governance: Philanthrocapitalism, Branded Citizenship, and the Selling of Corporate Social Responsibility* (Issue July) [UNIVERSITY OF MINNESOTA].

https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/165801/Schowalter_umn_0130E_15234.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Weiss, T. G., & Wilkinson, R. (2013). *International Organization and Global Governance*. In Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315301914>

Weiss, T. G., & Wilkinson, R. (2018). *International Organization and Global Governance*. In Thomas G. Weiss and Rorden Wilkinson (Ed.), *International Organization and Global Governance* (2nd ed., p. 803). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315301914>

Youde, J. (2018). The role of philanthropy in international relations. *Review of International Studies*, 45(1), 39–56. <https://doi.org/10.1017/S0260210518000220>